

jogja
istimewa



Rancangan Akhir
RENSTRA
2022 - 2027
Rencana Strategis

**Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridloNya telah dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 - 2027. Renstra ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 - 2027.

Dinamika perekonomian secara makro dan berbagai tantangan dan permasalahan sektor industri dan perdagangan baik lokal, regional, nasional maupun internasional sebagai dampak terjadinya pandemi COVID-19 akan dijadikan dasar untuk memprediksi kondisi lima tahun ke depan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk merencanakan ulang program pembangunan jangka menengah sektor industri dan perdagangan di DIY dalam dokumen rencana strategis (renstra). Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 - 2027. Selain itu, juga diselaraskan dengan Kebijakan Kementerian Teknis. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor industri dan perdagangan DIY sehingga pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022 - 2027 diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menyusun perencanaan jangka pendek di sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ir SYAM ARJAYANTI M.P.A
NIP. 196712041993032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	2-6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-19
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3-21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-21
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3-21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota	3-22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3-26
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	4-27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-27
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5-26
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-36
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-69
BAB 8 PENUTUP.....	8-70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Jabatan.....	2-11
Tabel 2.2 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pendidikan.....	2-12
Tabel 2.3 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	2-13
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-14
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-14
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-16
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	3-20
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	3-21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	4-25
Tabel 5.1 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (Analisis SWOT).....	5-30
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	5-31
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	6-37
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urusan Kebudayaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	6-57
Tabel 7 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	7-62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	1-2
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2-12
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-7
Gambar 2.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan.....	2-13



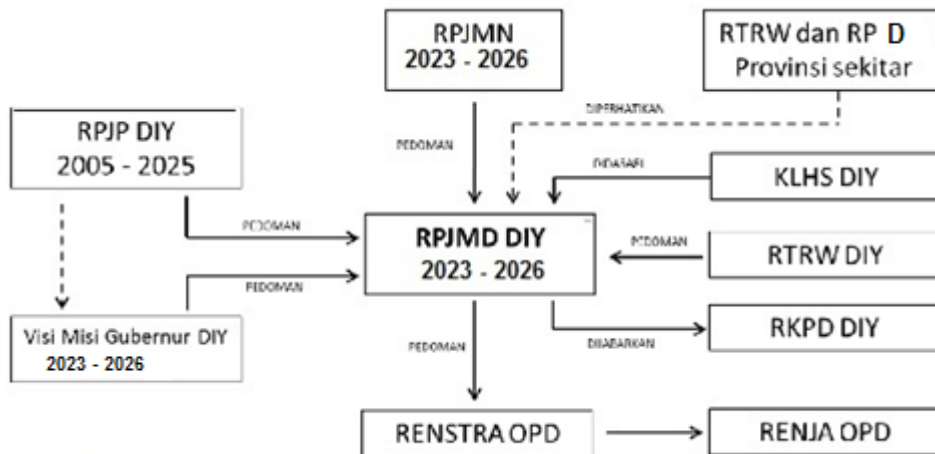
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 86 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.—Tugas dan Fungsi Disperindag DIY adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode lima tahunan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dimana RPJMD DIY 2022-2027, disusun dengan berpedoman pada RPJP DIY 2005–2025, RPJMN 2020 –2024, Visi, Misi Gubernur DIY 2022-2027, RTRW DIY, didasari KLHS DIY, dan memperhatikan RTRW dan RPJMD Provinsi Sekitar. RPJMD DIY 2022-2027 akan dijabarkan ke dalam RKPD DIY untuk setiap tahunnya. Posisi Renstra Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan melalui gambar 1.1.



Gambar 1. 2. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinamika perekonomian secara makro, berbagai tantangan dan permasalahan sektor industri serta perdagangan baik lokal, regional, nasional maupun internasional akan dijadikan dasar untuk memprediksi kondisi lima tahun ke depan. Selain itu, dampak terjadinya pandemi COVID-19 juga akan menjadi dasar untuk memprediksi kondisi lima tahun ke depan.

Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir masa RPJMD yaitu tahun 2027. Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) Disperindag DIY dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Disperindag DIY yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Disperindag DIY setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur DIY.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan operasional fungsional semua program dan kegiatan yang disusun adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang tentang Perindustrian;
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang tentang Perdagangan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

- 18) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2).
- 19) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2022-2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 - 2027, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut ini.

- a. Menterjemahkan visi dan misi RPJMD dalam tujuan dan sasaran pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2022 - 2027, yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027;
- b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY serta rencana pembiayaan untuk periode Tahun Anggaran 2022 - 2027 yang memperhatikan kondisi perekonomian akibat adanya pandemi COVID-19;
- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 - 2027 yang memperhatikan kondisi perekonomian akibat adanya pandemi COVID-19;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra; serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; penentuan isu-isu strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dinas.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan DIY untuk kurun waktu 2022 - 2027.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian dan perdagangan.

BAB 8 PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

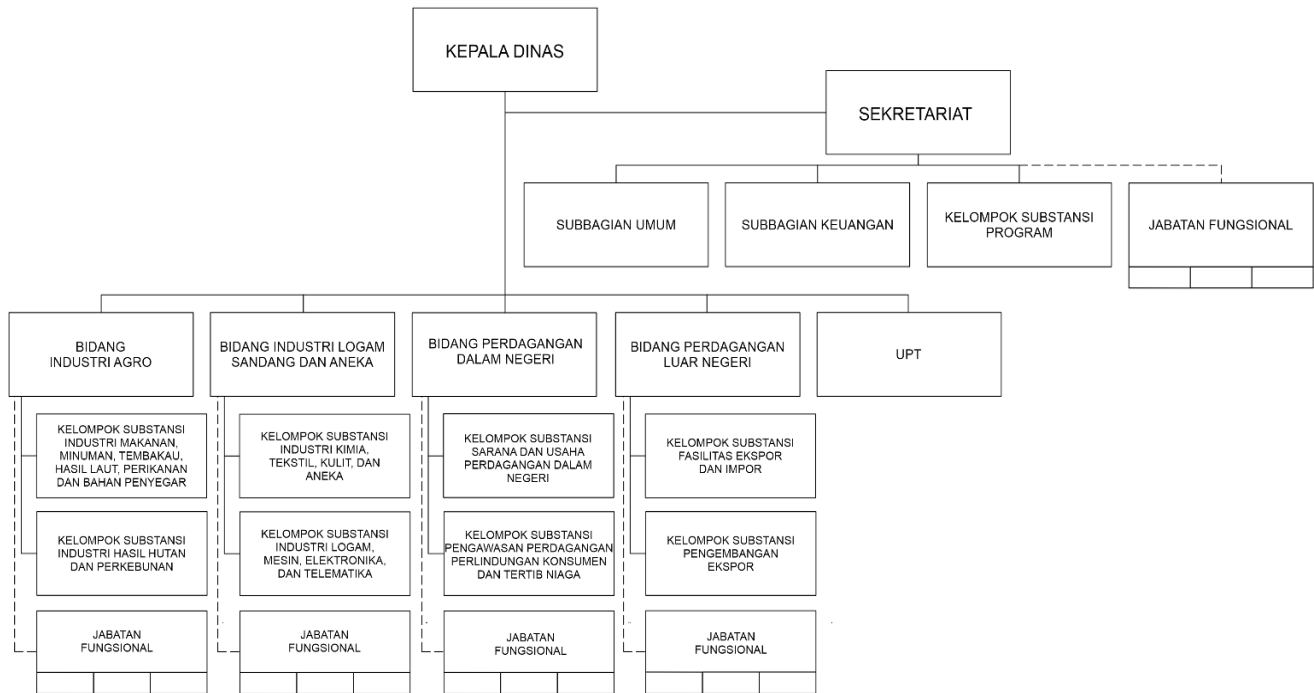
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
- e. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
- f. fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan diluar kawasan peruntukan industri;
- g. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
- i. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- j. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
- k. penyediaan layanan / fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dilingkup kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya;
- l. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
- m. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan fasilitasi Angka Pengenal Impor (API);
- n. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- o. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- p. fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor;
- q. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
- r. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- s. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- u. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki 4 bidang dan 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan struktur organisasi sebagai berikut ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Sekretariat; perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; penyusunan program Dinas; pengelolaan keuangan Dinas; penyelenggaraan kepegawaian Dinas; penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas; pelaksanaan program administrasi perkantoran; pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Penyelenggaraan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; Penyelenggaraan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan

kinerja Dinas; fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat didukung tiga sub bagian, yaitu : Sub Bagian Program, Subbag Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri agro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri Agro mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Industri Agro; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Industri Agro; pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), dan kawasan industri; fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri Agro; promosi produk industri Agro; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pembinaan dan pengembangan industri kreatif Agro; pembinaan dan pengawasan industri kecil, industri menengah dan industri besar Agro di wilayah DIY; koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar Agro lintas kabupaten/kota; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Industri Agro; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bidang Industri Agro didukung oleh dua seksi yaitu: Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar serta Seksi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar dipimpin.

Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka

Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri logam, sandang dan aneka. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka; pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), dan kawasan industri; fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri Logam, Sandang dan Aneka; promosi produk industri Logam, Sandang dan Aneka; pelaksanaan tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pembinaan dan pengembangan industri dan industri kreatif Logam, Sandang dan Aneka; pembinaan dan pengawasan bagi industri kecil, industri menengah dan industri besar Logam, Sandang dan Aneka; koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan pengembangan industri kecil, menengah, industri besar Logam, Sandang dan Aneka lintas kabupaten/kota; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Sandang dan Aneka; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang ini didukung oleh dua seksi yaitu: Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit dan Aneka sebagaimana serta Seksi Industri Kimia, Tekstil, Kulit dan Aneka dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Perdagangan Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri; pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Dalam Negeri; pengkajian dan pemeriksaan usaha perdagangan bahan berbahaya; penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri; pemantauan, pengelolaan data, dan fasilitasi pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan; pemasaran dan promosi produk; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang; pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengembangan dan penggunaan produksi dalam negeri; pembinaan di bidang kelembagaan, kemitraan dan usaha perdagangan; pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; kerjasama dengan mitra kerja bidang perdagangan; fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen; pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga; pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bidang ini didukung oleh dua seksi, yaitu: Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Luar Negeri; fasilitasi ekspor impor; pengelolaan data dan informasi ekspor impor; analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan tujuan ekspor potensial; pelaksanaan hubungan kerjasama dan temu bisnis perdagangan luar negeri; pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri; pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut bidang ini didukung oleh dua seksi yaitu Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor serta Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor dipimpin oleh Kepala Seksi.

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna; pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; pelaksanaan produksi dan pelayanan perbaikan alat teknologi tepat guna; pelaksanaan pemasaran alat teknologi tepat guna; pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna; pelaksanaan produksi dan pengembangan kemasan; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya balai ini didukung oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Rekayasa dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan dan produksi alat tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini didukung oleh Seksi Rekayasa dan Produksi dan Seksi Pelayanan Pengembangan Kemasan dan Produk Kulit.

Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual; pemberdayaan potensi kekayaan intelektual; pembinaan dan advokasi kekayaan intelektual; pengelolaan sistem manajemen informasi kekayaan intelektual; pembinaan Sentra Kekayaan Intelektual; pelayanan bimbingan konsultasi kekayaan intelektual; fasilitasi kekayaan intelektual; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelayanan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai ini didukung oleh satu subbag dan dua seksi yaitu: Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, dan Seksi Fasilitasi Kekayaan Intelektual Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

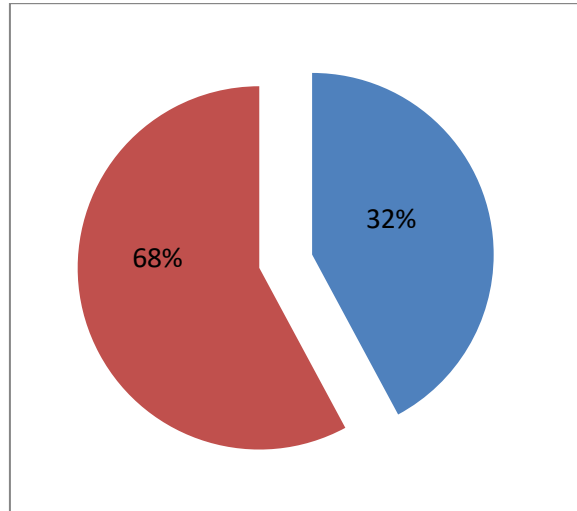
Berikut ini rekapitulasi jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY per 31 Januari Tahun 2023.

Tabel 2.1 Rekapitulasi jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang / Kepala Balai	4	4	8
4.	Kepala Seksi / Kepala Sub. Bagian	3	3	6
6.	Fungsional Tertentu	13	6	19
7.	Fungsional Umum	33	17	50
8.	CPNS	5	1	6

9.	Tenaga Bantu	29	10	39
	Jumlah	89	41	130

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 31 Januari 2023 sebanyak 130 orang, terdiri dari 89 orang atau 68% berjenis kelamin laki-laki dan 41 orang atau 32% merupakan pegawai perempuan.

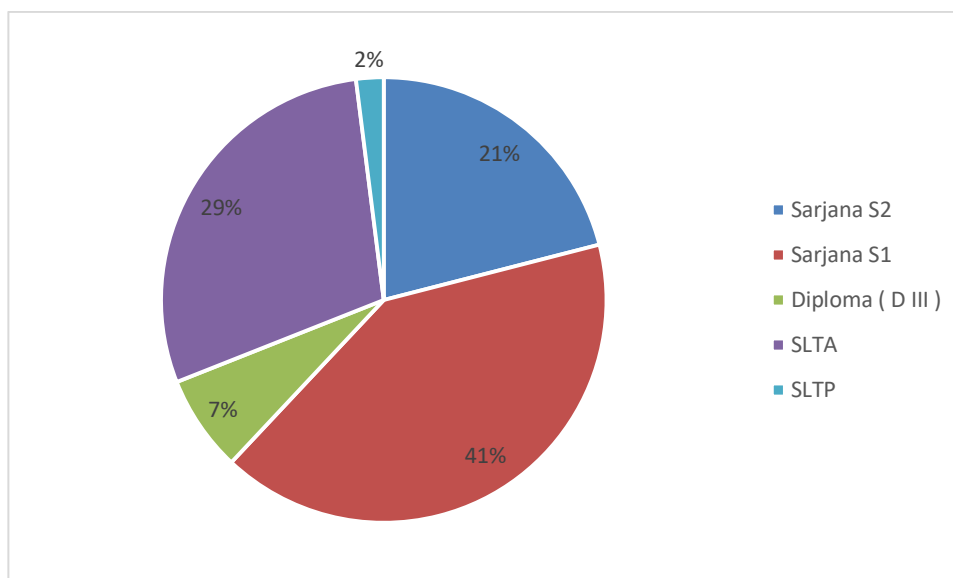


Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari jenjang pendidikan, jumlah terbesar 29% atau sebanyak 37 orang merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Jumlah PNS dengan pendidikan lulusan S2 sebanyak 20 orang atau 16%, lulusan S1 sebanyak 37 orang atau 29% dan lulusan D3 sebanyak 6 orang atau 5%. Adapun untuk lulusan SLTP sebanyak 2 orang atau 2% dan lulusan SD sebanyak 1 orang atau 1%.

Tabel 2.2 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sarjana S2	12	6	18
2.	Sarjana S1	18	16	34
3.	Diploma (D III)	3	3	6
5.	SLTA	17	7	24
6.	SLTP	1	1	2
	Jumlah	52	32	84



Gambar 2.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Tabel 2.3 menyajikan jumlah pegawai Disperindag DIY, berdasarkan pangkat dan golongan.

Tabel 2.3 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda Madya Tk I (IV/d)	-	-	-
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
3.	Pembina Tk . I (IV /b)	-	3	3
4.	Pembina (IV /a)	1	4	5
5.	Penata Tk. I (III /d)	8	4	12
6.	Penata (III /c)	6	6	12
7.	Penata Muda Tk. I (III /b)	7	5	12
8.	Penata Muda (III /a)	13	8	21
9.	Pengatur TK. I (II /d)	11	1	12
10.	Pengatur (II /c)	3	2	5
11.	Pengatur Muda Tk. I (II /b)	-	-	-
12.	Pengatur Muda (II /a)	1	-	1
13.	Juru Tk. I (I /d)	-	-	-
14.	Juru (I /c)	-	-	-
	Jumlah	50	34	84

Agar dapat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan,serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berikut ini sarana dan prasarana yang dimiliki Disperindag DIY.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	11 Unit	-
2.	Peralatan dan Mesin	852 Unit	-
3.	Gedung dan Bangunan	18 Unit	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15 Unit	-
5.	Aset Tetap Lainnya	1.350 Unit	-

Salah satu wujud dari ketugasan Disperindag DIY adalah layanan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi tepat guna dan sevara teknis dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG). Secara riil, pengembangan teknologi tepat guna ini diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang berupa produksi ATG, jasa perbengkelan, jasa perbaikan ATG, dan layanan jasa kemasan. Untuk menyelenggarakan layanan langsung kepada masyarakat tersebut, BPTTG didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut ini.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BPTTG

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesin Bor	5 Unit	
2	Mesin Bor tangan	10 Unit	
3	Mesin Bubut	2 Unit	
4	Mesin Cylinder	2 Unit	
5	Mesin Gergaji	1 Unit	
6	Mesin Gergaji Logam	1 Unit	
7	Mesin Gerinda	2 Unit	
8	Mesin Gerinda tangan	16 Unit	
9	Mesin Ketam	2 Unit	
10	Mesin Ketam	4 Unit	
11	Mesin Kompresor	4 Unit	
12	Mesin Milling	1 Unit	
13	Mesin Pemotong Plat	3 Unit	
14	Mesin Pres Hidrolik dan Punsh	3 Unit	
15	Alat Ukur Uji	1 Unit	
16	Peralatan Las Karbit	1 Unit	
17	Peralatan Las Listrik	8 Unit	
18	Perkakas Bangku Kerja	4 Unit	
19	Perkakas Pemotong Plat	1 Unit	
20	Forklift	4 Unit	
21	Genset	1 Unit	
22	Landasan Kenteng	1 Unit	
23	Pickup	2 Unit	
24	Komputer	13 Unit	
25	Lain-lain	165 Unit	
	Jumlah	257 Unit	

Selain sumberdaya yang telah disebutkan diatas, dalam melaksanakan ketugasannya, Disperindag DIY juga didukung oleh sumber daya yang berbasis teknologi informasi. Berikut ini adalah aplikasi yang mendukung ketugasan Disperindag DIY.

1. Website Disperindag
Website Disperindag beralamatkan di <http://disperindag.jogjaprov.go.id>. Melalui website ini, Disperindag DIY dapat menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan ketugasannya kepada masyarakat.
2. Website Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG)
Website BPTTG beralamatkan di <http://bpttg.jogjaprov.go.id>. Melalui website ini, BPTTG DIY dapat menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan ketugasannya kepada masyarakat.
3. Aplikasi Jogjaplaza
Aplikasi jogjaplaza ini merupakan aplikasi mall online yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi Disperindag DIY kepada pelaku usaha sector industry dan perdagangan DIY agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Aplikasi ini beralamatkan di <http://jogjaplaza.jogjaprov.go.id>.
4. Aplikasi Pelayanan HKI Online
Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi Disperindag DIY kepada pelaku usaha sector industri dan perdagangan DIY berkaitan dengan perlindungan atas kekayaan intelektualnya. Aplikasi ini beralamatkan di <http://jogjaki.jogjaprov.go.id>.
5. Aplikasi E-Arsip
Aplikasi E-Arsip merupakan aplikasi yang dibangun Disperindag DIY untuk mengelola arsip secara digital. Melalui aplikasi ini, arsip yang sudah didigitalisasi disimpan secara digital sehingga mudah untuk dipanggil kembali jika dibutuhkan.
6. Aplikasi Jogja Busines Service Centre (JBSC)
Dalam rangka meningkatkan layanan Disperindag kepada pelaku usaha di DIY di tengah terjadinya pandemi covid-19, dimana layanan tatap muka dibatasi, maka disperindag mengembangkan aplikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pelaku usaha yang ingin mengkonsultasikan permasalahan usahanya untuk mendapatkan solusi. Perwakilan dari berbagai instansi dilibatkan sebagai operator dan konsultan pada aplikasi ini.
7. Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER)
Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER) merupakan layanan pengaduan konsumen secara online.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Periode Renstra Sebelumnya

Target kinerja pada akhir masa renstra Disperindag DIY periode 2017 – 2022 menunjukkan kinerja yang positif pada tahun 2018 dan 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 kinerja layanan Disperindag DIY terendala adanya Covid-19. Capaian target kinerja pelayanan Disperindag DIY, disajikan dalam table 2-1.

Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Milyar Rupiah)				1,55	1,75	1,95	2,25		1,95	1,95	1,29	2,48		126%	111%	66%	110%	
2	Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (persen)				5,69	5,61	5,5	5,5		5,69	5,69	1,92	1,2		100%	101%	35%	22%	
3	Nilai Produksi IKM (Juta Rupiah)				12.724.663	12.979.156,00	13.238.739	13503.514		12.749.271	13.041.847.615	12.561.595	13503514		100%	100%	95%	100%	
4	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing (persen)				0.06	na	na	na		0.06	na	na	na		100%	na	na	na	
5	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Juta US\$)				302,54	308,59	314,76	321,06		327,18	344,80	410,06	521,04		108%	112%	130%	162%	
6	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (produk ATG)				18	21,00	24	27		18	28,00	42	39		100%	133%	175%	144%	
7	Jumlah HAKI yang terdaftar (unit)				na	100,00	120	150			100,00	277	150		na	100%	231%	100%	
8	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)				100	100,00	100,00	na		100	100,00	100,00			100%	100%	100%	na	
9	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)				100	100,00	100,00	na		100	100,00	100,00			100%	100%	100%	na	
10	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran				100	100,00	100,00	na		100	100,00	100,00			100%	100%	100%	na	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tugas dan fungsi SKPD (persen)																		
11	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)				na	na	na	100					100		na!	na	na	100%	

Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Miliar)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. Miliar)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak Langsung	11,78	11,98	11,21	15,12	8,76	11,58	11,76	11,00	14,68	8,56	98,31	98,21	98,03	97,07	97,66	-3%	10%
Belanja Langsung	19,52	15,91	15,15	17,90	17,66	17,72	14,90	14,26	16,09	17,07	90,78	93,68	94,1	89,90	96,60	-2%	-2%
Total Belanja	31,30	27,88	26,36	33,02	26,43	29,30	26,66	25,26	30,77	25,62	93,61	95,63	94,5	93,18	96,96	-3%	3%

*) diisikan nama Perangkat Daerah

*) Disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Pelayanan di sektor perdagangan dan perindustrian tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada table 2-2 disajikan perkembangan anggaran Disperindag DIY selama tahun 2017 – 2022. Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa secara rata-rata anggaran Disperindag DIY mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 3 %. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kemetrolgion dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten.

b. Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 – 2021

Kinerja pembangunan sector perindustrian dan perdagangan DIY pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan capaian yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan terlampauinya target kinerja sasaran pada tahun tersebut. Target kinerja Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY dapat terlampaui dengan capaian sebesar 101% pada tahun 2018 dan begitu pula tahun 2019. Target kinerja Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY dapat terlampaui dengan capaian sebesar 103% pada tahun 2018 dan sebesar 104% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 capaian kinerja sector perindustrian dan perdagangan sebesar 99% dan 96%. Hal ini, disebabkan dampak dari adanya pandemic Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 target kinerja sector ini dapat tercapai.

Tabel 2-7 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	8.122.805	8.528.946	8.955.393	9.403.163	8.219.289	8.219.289	8.228.553	9.490.978	101%	96%	92%	101%
Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp. Juta)	12.151.563	12.637.626	13.143.131	13.668.856	12.487.005	12.487.004	12.577.438	13.759.739	103%	99%	96%	101%

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY juga menunjukkan capaian yang positif, jika dilihat dari capaian target indikator program. Pada table 2-8 terlihat bahwa hampir semua target program dapat tercapai.

Tabel 2-8 Pencapaian Target Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Milyar Rupiah)	1,55	1,75	1,95	2,25	1,95	1,95	1,29	2,48	126%	111%	66%	110%
2	Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (persen)	5,69	5,61	5,5	5,5	5,69	5,69	1,92	1,2	100%	99%	286%	458%
3	Nilai Produksi IKM (Juta Rupiah)	12.724.663	12.979.156,00	13.238.739	13503514	12.749.271	12.322.138,11	12.561.595	13503514	100%	95%	95%	100%
5	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahunan (Juta US\$)	302,54	308,59	314,76	321,06	327,18	344,80	410,06	521,04	108%	112%	130%	162%
6	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (produk ATG)	18	21,00	24	27	18	28,00	42	39	100%	133%	175%	144%
7	Jumlah HAKI yang terdaftar (unit)	n/a	100,00	120	150	n/a	100,00	277	150	n/a	100%	231%	100%
8	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)	100	100,00	100,00	n/a	100	100,00	100,00	n/a	100%	100%	100%	n/a
9	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)	100	100,00	100,00	n/a	100	100,00	100,00	n/a	100%	100%	100%	n/a

NO	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Rasio			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
10	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (persen)	100	100,00	100,00	n/a	100	100,00	100,00	n/a	100%	100%	100%	n/a
11	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor sektor dan perdagangan.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dan peluang dapat dijabarkan menjadi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan bagi DIY sebagai berikut :

a. Peluang

- Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.
- Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja.
- Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.
- Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY.
- Semakin berkembangnya pasar, sarana dan prasarana, serta bisnis penunjang yang mendukung perdagangan secara online.

b. Ancaman

- Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
- Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor.
- Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih.
- Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi.
- Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor.
- Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku IKM.
- Maraknya produk-produk dari negara-negara yang lebih dahulu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19

c. Kekuatan

- DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan
- Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif,
- Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (*growth pole*) di wilayah Selatan serta di jalur transportasi barat-timur,
- Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif.
- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional

d. Kelemahan

- Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi,
- Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar,
- Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal,
- Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,
- Lemahnya entrepreneurship IKM di DIY.
- Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Permasalahan pembangunan pada bidang ekonomi yang meliputi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

a. Perdagangan

- 1) Akses pasar dan jaringan pemasaran belum optimal;
- 2) Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung;
- 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
- 4) Terbatasnya pelaku usaha IKM yang berorientasi ekspor;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
- 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestic
- 7) Meningkatnya pesaing baik dari luar negeri maupun daerah lain
- 8) Sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan, seperti transportasi, pelabuhan
- 9) Fluktuasi harga barang dipasar yang kadang tidak terkendali
- 10) Belum adanya standar baku penanganan permasalahan perdagangan di tingkat local
 - a. Perbedaan harga antara yang tertera di produk dan di nota pembayaran
 - b. Perbedaan jumlah item barang yang dibeli
- 11) Minimnya pengetahuan eksportir tentang kondisi perekonomian global dan pengaruhnya pada komoditas yang diekspor
- 12) Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen resiko perdagangan luar negeri
- 13) Mahalnya sertifikasi produk terutama untuk komoditas ekspor, seperti misalnya sertifikasi legalitas kayu (SVLK) dan Sertifikasi Keamanan Pangan (HaCCP)

b. Perindustrian

- 1) Daya saing produk IKM belum optimal;
- 2) Ketersediaan bahan baku industri produk local maupun ekspor kurang

- 3) Sistem pengembangan IKM belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar belum berjalan baik
- 5) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk;
- 6) Belum optimalnya peningkatan daya saing produk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
- 7) Perlindungan Kekayaan Intelektual pelaku usaha sector industry dan perdagangan masih perlu ditingkatkan
- 8) Kapasitas produksi IKM yang masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 9) Energi, Tarif Dasar Listrik yang masih mahal
- 10) Iklim usaha yang kurang kondusif
- 11) Adanya kendala birokrasi seperti perizinan, regulasi yang kurang melindungi pelaku usaha
- 12) Akses ke sentra-sentra industri terkendala dengan kualitas infrastruktur yang masih rendah
- 13) Efisiensi logistik yang masih perlu ditingkatkan

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.

Pengembangan perindustrian secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perindustrian. Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari renstra kementerian perindustrian, sebagaimana disajikan dalam tabel.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra Kementerian K/L	Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY			Faktor	
			Penghambat		Pendukung	
A.	Kementerian Perindustrian					
	1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional.	• Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaansektor industri tingkat provinsi dan kabupaten/kota	• Masih terbatasnya data sector Industri	• Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota		
	2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri		• Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian	• Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat		
	3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri			• Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan		
	4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional					
	5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi					

6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
7. Menguatnya struktur industri

B Kementerian Perdagangan

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri 2. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN) 3. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang 4. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang 5. Peningkatan Perlindungan Konsumen 6. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi 8. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan 9. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sektor perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota |
|--|---|---|--|

Sementara itu, pengembangan sector sektor dan perdagangan di daerah juga didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pada tabel 3.2 disajikan Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel 3-2 Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra Disperindag Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Disperindag DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
A.	Disperindag Kota Yogyakarta			

<p>1. Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
<p>B Disperindag Kabupaten Kulon Progo</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai usaha industri 2. Peningkatan nilai usaha perdagangan 3. Peningkatan kualitas pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
<p>C Disperindag Kabupaten Gunungkidul</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan sektorsektor dan perdagangan yang meningkat dan Sarana dan prasarana perdagangan meningkat 2. Terwujudnya keselarasan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan
<p>D Disperindag Kabupaten Sleman</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keamanan pangan pada target usaha, 2. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan, 3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional, 4. Meningkatnya ketertiban PKL, 5. Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektorsektor dan perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sector industri dan perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian dan perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan

	6. Meningkatnya pengelolaan sampah di pasar tradisional			
D	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB 3. sektor perdagangan 4. Meningkatnya kualitas pasar rakyat 6. Meningkatnya pertumbuhan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sektor perdagangan • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perdagangan • Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota
D	Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul			
1	Meningkatnya Industri Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor industri tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data sector industri • Belum dipunyainya fungsional tertentu penyuluh perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Adanya dukungan anggaran pendataan dari Pusat • Beberapa Kabupaten telah melakukan pendataan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan pengembangan kawasan strategis DIY didasarkan pada Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Pada Pasal 7 Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 ditetapkan kawasan strategis DIY, diantaranya Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Kawasan strategis Pertumbuhan Ekonomi yang terkait dengan pengembangan sektor industri ditetapkan pada Pasal 98 nomor: 6 yang menetapkan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulonprogo. Pasal 63 RTRW Provinsi DIY menetapkan: Arahan penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 61 kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, kabupaten bantul, kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan kawasan-kawasan industri perlu segera digairahkan untuk mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian, mengingat sektor industri di wilayah ini laju pertumbuhannya cukup kecil. Pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Kulon Progo diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi di wilayah Kulon Progo.

Selain kawasan industri, isu yang juga berhubungan dengan pengembangan industri adalah pengembangan sentra IKM. Secara umum, sentra IKM di DIY bukan merupakan sentra IKM yang *high polutan* yang memerlukan lokasi khusus yang terpisah dengan lokasi

tempat tinggal. Sehingga pola pengembangan yang sesuai adalah revitalisasi sentra dan bukan pembangunan sentra. Pengembangan sentra IKM diarahkan pada daerah-daerah yang telah memiliki Sentra IKM namun berada dalam kondisi yang belum berkembang dengan baik dan membutuhkan fasilitasi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Disperindag DIY merupakan OPD yang memiliki ketugasan untuk melaksanakan pemerintahan daerah dibidang industri dan perdagangan. Dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang sektor dan perdagangan. Pengembangan sektor industri, harus memperhatikan Kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang. Kebijakan RTRW yang terkait dengan pengembangan sektor industri diantaranya ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulonprogo dan penetapan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, kabupaten bantul, kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Dalam perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi sektor-sektor binaan. Terkait dengan skema besar tentang Renaisans Yogyakarta, isu strategis DIY yang berhubungan dengan ketugasan Dinas Perindag DIY yang tertuang di dalam RPJMD DIY 2022 - 2027 adalah “masih tingginya angka kemiskinan” dan “Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah”.

Selanjutnya dalam penjabarannya sesuai dengan tugas pengembangan sektor industri dan perdagangan maka dilakukan analisis Isu-Isu Strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor Industri dan Perdagangan dari tahun 2022 - 2027.

1. Transformasi Digital menuju industry 4.0
2. Optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri/ Kawasan Industri
3. Ketersediaan bahan baku industri
4. Penumbuhan IKM baru
5. Penerapan green economy dan green industry
6. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Industri
7. Peningkatan standarisasi produk untuk meningkatkan daya saing IKM
8. Peningkatan kapasitas pelaku usaha IKM
9. Peningkatan daya saing IKM melalui sertifikasi dan standarisasi produk
10. Peningkatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di DIY
11. Keterbatasan IKM berorientasi ekspor menuju pasar global
12. Sinergitas hulu hilir pengembangan ekspor antar stakeholder di DIY belum optimal
13. Kelangkaan dan mahal nya tarif pengiriman barang ekspor
14. Peningkatan kinerja ekspor melalui kemitraan pelaku usaha kecil dan eksportir DIY
15. Peningkatan pemasaran dalam dan luar negeri
16. Stabilisasi harga dan stock bapokting pasca Pandemi Covid-19
17. Peningkatan perlindungan konsumen
18. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Indonesia Dengan Negara lain belum optimal

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur DIY dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027, serta dalam rangka membangun sektor industri dan perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”.

Sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 adalah meningkatnya nilai perdagangan. Sedangkan sasaran Disperindag DIY dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian adalah meningkatnya industri pengolahan.

Pada table 4-1, disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY beserta indikator kinerjanya.

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya daya saing sektor Industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY			12,05 %	12,10 %	12,15 %	12,20 %	12,25 %	12,30 %	12,30 %
			Meningkatnya industri pengolahan	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	n/a	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
				Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 34 Juta/Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perangkat Daerah								
2	Terwujudnya daya saing sektor Perdagangan	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY			8,29 %	8,34 %	8,39 %	8,44 %	8,49 %	8,54 %	8,54 %
			Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	n/a	5,32 %	5,38 %	5,43 %	5,49 %	5,49 %
				Nilai Ekspor Tahunan	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan strategik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana strategis mencakup Visi dan Misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan dan Program.

Agar pelaksanaan program/kegiatan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir.

Untuk dapat diketahui seberapa besar peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan maka dilakukan upaya-upaya mencermati dan menganalisis lingkungan eksternal dan internal sebagai berikut :

1. Analisis Eksternal

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Posisi DIY dalam konteks nasional sangat strategis, terutama pasca ditetapkannya Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan status keistimewaan, DIY mempunyai posisi tawar yang tinggi, baik sebagai daerah pengembangan budaya maupun pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Pergeseran paradigma pembangunan “Dari Among Tani Menuju Dagang Layar” ditempuh melalui strategi akselerasi pengembangan wilayah Pantai Selatan (Pansela). Selain itu juga mengembangkan potensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa bagi kawasan Jawa bagian selatan dan sebagai penghubung bagi daerah sekitarnya dalam mengakses pasar internasional. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilakukan dengan cara mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim di wilayah pesisir.

Faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi DIY dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

e. Peluang

- Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.

- Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja.
- Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.
- Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY.
- Semakin berkembangnya pasar, sarana dan prasarana, serta bisnis penunjang yang mendukung perdagangan secara online.

f. Ancaman

- Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
- Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor.
- Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih.
- Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi.
- Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor.
- Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM.
- Maraknya produk-produk dari negara-negara yang lebih dahulu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19

2. Analisis Internal

Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat khususnya KUKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan yang dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan

- DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan
- Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif,
- Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (*growth pole*) di wilayah Selatan serta di lalui jalur transportasi barat-timur,
- Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif.
- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional

b. Kelemahan

- Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi,

- Lemahnya IKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar,
- Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal,
- Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional,
- Lemahnya entrepreneurship IKM di DIY.
- Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM

Dengan mengetahui / memahami Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman maka tahap selanjutnya adalah menuangkan semua aspek tersebut kedalam tabel Analisis (Analisis SWOT) untuk dapat ditemukan Strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Disperindag DIY.

Tabel 5-1 Matrik Analisa Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL / ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan 2. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai daerah Tujuan Wisata terkemuka sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif, 3. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>) di wilayah Selatan serta di lalui jalur transportasi barat-timur, 4. Kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk industri yang inovatif. 5. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional	1. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi, 2. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar, 3. Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI, serta penerapan SNI masih dirasakan cukup mahal, 4. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah DIY yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional, 5. Lemahnya entrepreneurship UKM di DIY. 6. Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM
PELUANG	STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
1. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, 2. Posisi DIY di dalam Masterplan Percapatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya hub koridor di wilayah Selatan Jawa, 3. Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM dan penyerapan tenaga kerja. 4. Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM. Misalnya: keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN. 5. Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM di DIY. 6. Semakin berkembangnya pasar, sarana dan prasarana, serta bisnis penunjang yang mendukung perdagangan secara <i>online</i> .	1. Mengembangkan entrepreneurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 2. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun <i>online</i> , dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif 4. Koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	1. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas
ANCAMAN	STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)
1. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. 2. Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor, 3. Imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih 4. Kondisi perbankan dengan tingkat suku bunga tinggi dan proses kredit yang berbelit 5. Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor 6. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM. 7. Maraknya produk-produk dari negara-negara yang lebih dahulu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19	1. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY	1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Dari hasil tabel analisis tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik secara konvensional maupun online.
3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY.
5. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif.
7. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas.
8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

Tabel 5-2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global (5-33ector5-33y5-33 1 : Nilai 5-33ector perdagangan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 9.965.527 Juta menjadi Rp. 12.113.160 Juta pada tahun 2026)</p> <p>(5-33ector5-33y5-33 2 : Nilai 5-33ector 5-33ector5-33y pengolahan dalam PDRB DIY dari tahun 2022 sebesar Rp. 14.310.129 Juta menjadi Rp. 16.740.826 Juta pada tahun 2026)</p>	<p>1. Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri</p> <p>2. Meningkatnya 5-33ector5-33y pengolahan</p>	<p>1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk 5-33ecto, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online</p> <p>2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga.</p> <p>3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY</p> <p>1. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek</p>	<p>1. Peningkatan penggunaan produk 5-33ecto, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran</p> <p>2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga</p> <p>3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor</p> <p>1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk.</p>

		<p>produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>2. Pengembangan teknologi 5-34ector5-34y yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan 5-34ector5-34y yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>)</p> <p>3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk 5-34ector5-34y kreatif</p> <p>4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan</p> <p>5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan 5-34ector5-34y untuk IKM</p> <p>6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY</p>	<p>2. Pengembangan teknologi 5-34ector5-34y yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan 5-34ector5-34y yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>)</p> <p>3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif</p> <p>4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha</p> <p>5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan 5-34ector5-34y untuk IKM</p> <p>6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY</p>
--	--	---	---

VISI : Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

MISI I : Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

MISI 2 : Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;

MISI 3 : Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;

MISI 4 : Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	<p>1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha, pengembangan pemasaran</p> <p>2. Menjaga kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga.</p> <p>3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional</p>	<p>1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran</p> <p>2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga</p> <p>3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri</p>

Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan Penting	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga.	dan fasilitasi ekspor Peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga
Meningkatnya daya saing sektor Industri	Meningkatnya industri pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan sector industri yang berwawasan lingkungan (Green Industri) 3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industry kreatif 4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industry untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk. 2. Pengembangan teknologi industry yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Industri) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY
Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha, pengembangan pemasaran 2. Menjaga kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta keluaran program Disperindag DIY sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Disperindag. Program pengembangan sector industry dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Program Pengembangan Ekspor

Untuk mendorong pertumbuhan sector perdagangan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan pendorong peningkatan aktivitas ekonomi di DIY. Perkembangan ekspor DIY menunjukkan trend yang positif. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor DIY pada tahun 2018 meningkat 13,96% dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor DIY pada tahun 2018 adalah sebesar US\$ 338,02 Juta sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar US\$ 296,61 Juta. Peningkatan tersebut juga terjadi di tahun 2019. Peningkatan jumlah eksportir dan komoditas yang diperdagangkan mampu meningkatkan volume ekspor DIY dari 53,57 Juta kg pada tahun 2018 menjadi 64,17 Juta kg pada tahun 2019. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai ekspor DIY dari US\$ 338,02 Juta pada tahun 2018 menjadi US\$ 370,22 Juta pada tahun 2019. Komoditi unggulan ekspor DIY diantaranya adalah Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Biji Vanila, Minyak Atsiri, STK Sintetis, Pakaian Jadi Kulit, Kerajinan Tas, Bambu, Produk Tekstil Lainnya, Kerajinan Kayu, Kerajinan Anyaman, Wig, dan Kerajinan Batu. Negara tujuan ekspor utama DIY adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australia, Perancis, China, dan Spanyol. Peningkatan volume usaha bidang perdagangan luar negeri sangat penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di DIY. Akan tetapi terdapat berbagai kendala, diantaranya:

- a. Potensi IKM DIY sangat tinggi (97.013 UU) akan tetapi jumlah eksportir masih terbatas. Pada tahun 2019 hanya sebanyak 400 Eksportir.
- b. Kurangnya kemampuan eksportir dalam mengakses pasar luar negeri.
- c. Minimnya pengetahuan eksportir tentang kondisi perekonomian global serta kebijakan yang berkaitan dengan ekspor dan pengaruhnya pada komoditas yang diekspor.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sector perdagangan luar negeri DIY.

Program peningkatan dan pengembangan ekspor diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Aktivitas utama program ini adalah: Pembinaan eksportir; Fasilitasi perizinan ekspor dan impor; Pemasaran produk ekspor & temu bisnis.

2. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pertumbuhan sector perdagangan dalam PDRB DIY dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sector perdagangan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain:

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- b. Rendahnya kapasitas berbisnis pelaku usaha perdagangan

Berbagai aktivitas dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- b. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri

3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Sektor perdagangan cukup rentan terhadap gejolak seperti fluktuasi harga, ketersediaan barang serta isu keamanan barang/jasa. Program ini bertujuan untuk menjamin kestabilan pasokan dan harga serta menjamin hak-hak konsumen. Beberapa permasalahan terkait dengan pengawasan barang/jasa serta perlindungan konsumen adalah berikut ini.

- a. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga
- b. Perlindungan konsumen masih kurang
- b. Belum optimalnya pengamanan pasar dalam negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan konsumen dalam rangka keamanan dan kepastian hukum serta stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting sangat diperlukan. Program ini mewadahi aktivitas dalam rangka penciptaan keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, sebagai berikut ini.

- a. Pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- c. Penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen
- d. Pengawasan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Untuk mendorong pertumbuhan sector Industri Pengolahan DIY diperlukan peningkatan nilai produksi diantaranya dari pelaku IKM. Pelaku Industri Kecil Menengah di DIY berjumlah 97.013 unit usaha. DIY didominasi oleh IKM Pangan dengan jumlah IKM 40.198 UU, Sandang dan kulit sebanyak 10.519 UU, Kimia dan bahan bangunan sebanyak 19.098 UU, Logam dan Elektronika sebanyak 12.126 UU, dan Kerajinan sebanyak 15.072 UU. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan, diketahui bahwa akibat terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perekonomian secara global, sehingga banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan produktivitas atau bahkan gulung tikar. Oleh karena adanya factor eksternal yang diluar kendali tersebut, maka target kinerja program ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pengembangan usaha IKM sangat diperlukan dalam peningkatan aktivitas ekonomi di DIY. Akan tetapi hal ini dihadapkan pada berbagai masalah, yaitu:

- a. Kurangnya daya saing produk IKM;
- b. Ketersediaan bahan baku kurang
- c. Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar belum berjalan baik

Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pelaku usaha industri kecil menengah. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- a. Pelatihan kemampuan produksi, diversifikasi produk, desain produk
 - b. Pendampingan penerapan Standarisasi dan Sertifikasi
 - c. Test Pasar (Pameran bagi IKM yang telah mengikuti pelatihan)
 - d. Kerjasama antar sector, lintas sector dan lintas daerah di bidang Industri
5. Program Pengembangan Kearifan Lokal dan potensi Budaya

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan sinergi antara pelestarian budaya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari program pembangunan di segala bidang khususnya di Pemda DIY. Program ini bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut.

Program pengembangan sector industry dan perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditentukan untuk periode 2022 – 2027 harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindag DIY.

Penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Disperindag dalam mendukung visi dan misi Gubernur dari sisi pembinaan sector industri dan perdagangan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian target outcome program sector industri dan perdagangan setiap tahun atau capaian yang diinginkan pada akhir periode Renstra yang dapat dicapai. Indikator kinerja SKPD secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil target indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program Indag periode 2022 – 2027 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Tabel 6-1, disajikan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Terwujudnya daya saing sektor Industri				Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	12,05 %	12,05 %		12,10 %		12,15 %		12,20 %		12,25 %		12,30 %		12,30 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya industri pengolahan			Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	0,99 %		n/a		2,50 %		3,00 %		3,50 %		4,00 %		4,00 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 33 Juta/Orang		Rp. 34 Juta/Orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibangun	n/a	n/a	0	n/a	0	1 Sentra	1.000.000.000	2 Sentra	1.500.000.000	3 Sentra	2.000.000.000	3 Sentra	2.000.000.000	9 Sentra	6.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	2.000.000.000	9 Dokumen	6.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY		
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	0	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	0	0	3 Dokumen	2.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. 12,80 Triliun	Rp. 12,80 Triliun	17.067.629.500	n/a	19.964.702.000	Rp. 13,38 Triliun	12.960.000.000	Rp. 13,78 Triliun	19.500.000.000	Rp. 14,27 Triliun	20.000.000.000	Rp. 14,84 Triliun	20.500.000.000	Rp. 14,84 Triliun	92.924.702.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	6,6 Trilyun	6,6 Trilyun		6,8 Trilyun	n/a			n/a		n/a		n/a		n/a			
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	na	na	0	na	0	na	1.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	19.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	na	na	0	na	0	1	1.000.000.000	2	6.000.000.000	2	6.000.000.000	2	6.000.000.000	7	19.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	3950 IKM	3950 IKM	17.067.629.500	6.145 IKM	19.964.702.000	6.200 IKM	11.960.000.000	6.300 IKM	13.500.000.000	6.400 IKM	14.000.000.000	6.500 IKM	14.500.000.000	31.545 IKM	73.924.702.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	3950 Unit	3950 Unit	17.067.629.500	6145 Unit	19.964.702.000	6200 Unit	11.960.000.000	6300 Unit	13.500.000.000	6400 Unit	14.000.000.000	6500 Unit	14.500.000.000	31545 Unit	73.924.702.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	387.210 Orang	387.210 Orang	11.192.297.400	412.630 Orang	9.742.934.750	413.500 Orang	3.550.000.000	414.000 Orang	3.600.000.000	414.500 Orang	3.650.000.000	415.000 Orang	3.700.000.000	415.000 Orang	24.242.934.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	79,08 %	79,08 %		n/a		84,00 %		86,50 %		89,00 %		89,50 %		89,50 %			
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen	11.192.297.400	3 Dokumen	9.742.934.750	3 Dokumen	3.550.000.000	3 Dokumen	3.600.000.000	3 Dokumen	3.650.000.000	3 Dokumen	3.700.000.000	3 Dokumen	24.242.934.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	358.851.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	4.050.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			an Sumber Daya Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri																	gangan	
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	6.717.077.600	1 Dokumen	455.957.600	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	2.955.957.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4.116.368.800	4 Dokumen	9.236.977.150	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	4 Dokumen	17.236.977.150	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	15.543 Perusahaan	15.543 Perusahaan	0	n/a	0	16.543 Perusahaan	20.000.000	17.043 Perusahaan	20.000.000	17.543 Perusahaan	20.000.000	18.043 Perusahaan	20.000.000	18.043 Perusahaan	80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	35%	35%	0	36%	0	37%	20.000.000	38%	20.000.000	39%	20.000.000	40%	20.000.000	40%	80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.31.03 .1.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas	na	na	0	na	0	1 Dokumen	10.000 .000	1 Dokumen	10.000 .000	1 Dokumen	10.000 .000	1 Dokumen	10.000 .000	4 Dokumen	40.000. 000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi																	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IUPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	na	na	0	na	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	410 perusahaan	410 perusahaan	235.116.750	365 perusahaan	104.483.400	600 perusahaan	120.000.000	700 perusahaan	140.000.000	800 perusahaan	160.000.000	900 Perusahaan	180.000.000	900 Perusahaan	704.483.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS	400 orang	400 orang	235.116.750	125 orang	104.483.400	200 orang	120.000.000	200 orang	140.000.000	200 orang	160.000.000	200 orang	180.000.000	925 orang	704.483.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	235.116.750	1 Dokumen	104.483.400	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	704.483.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Nasional (SIINas)																		
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	n/a	0	n/a	0	60%	350.000.000	75%	50.000.000	85%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	0	0	0	0	0	100%	350.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	0	0	0	0	0	1	350.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah			Kategori RB Perangkat Daerah	A	A		A		A		A		A		A		A		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 85	Skor 85	19.321.433.266	Skor 85	19.777.493.157	Skor 85	23.418.250.000	Skor 85	25.480.035.000	Skor 85	27.755.348.500	Skor 85	29.079.848.500	Skor 85	125.510.975.157	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	100%	100%	141.977.000	100%	75.540.400	100%	98.000.000	100%	122.000.000	100%	148.000.000	100%	172.500.000	100%	616.040.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	102.569.000	4 Dokumen	36.098.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	65.000.000	4 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	95.000.000	4 Dokumen	326.098.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																				gangan	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	11.715.000	4 Dokumen	15.940.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	125.940.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	27.693.000	3 Laporan	23.502.400	3 Laporan	28.000.000	3 Laporan	32.000.000	3 Laporan	38.000.000	3 Laporan	42.500.000	3 Laporan	164.002.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	15.624.458.724	100%	16.557.934.407	100%	17.704.830.000	100%	18.723.115.000	100%	19.742.428.500	100%	20.248.428.500	100%	92.976.736.407	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang / Bulan	126 Orang / Bulan	15.541.978.724	119 Orang / Bulan	16.463.415.407	124 Orang / Bulan	17.500.000.000	129 Orang / Bulan	18.500.000.000	134 Orang / Bulan	19.500.000.000	139 Orang / Bulan	20.000.000.000	139 Orang / Bulan	91.963.415.407	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	1	102.850.000	1	113.135.000	1	124.448.500	1	124.448.500	4	464.882.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	70.980.000	12	354.900.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	6.000.000	1	11.764.100	1	17.000.000	1	22.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	107.764.100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	5.500.000	18	11.774.900	18	14.000.000	18	17.000.000	18	20.000.000	18	23.000.000	18	85.774.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01 .1.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	6.108.000	17 Paket	27.678.100	17 Paket	30.000.000	17 Paket	33.000.000	17 Paket	37.000.000	17 Paket	40.000.000	17 Paket	167.678.100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.475.000	1 Paket	51.184.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	54.000.000	1 Paket	56.000.000	1 Paket	58.000.000	1 Paket	271.184.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67.598.000	1 Paket	28.610.400	1 Paket	30.000.000	1 Paket	32.000.000	1 Paket	34.000.000	1 Paket	36.000.000	1 Paket	160.610.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.303.000	4 Paket	7.203.000	4 Paket	7.203.000	4 Paket	7.203.000	4 Paket	7.203.000	4 Paket	7.203.000	4 Paket	36.015.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	21 Paket	21 Paket	70.000.000	21 Paket	67.620.000	21 Paket	100.000.000	21 Paket	110.000.000	21 Paket	120.000.000	21 Paket	120.000.000	21 Paket	517.620.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Penggandaan	yang Disediakan																	gangan	
		0.00.01 .1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	17.100.000	2 Dokumen	7.468.800	2 Dokumen	17.100.000	2 Dokumen	17.100.000	2 Dokumen	17.100.000	2 Dokumen	17.100.000	2 Dokumen	75.868.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01 .1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	264.937.000	1 Laporan	160.729.000	1 Laporan	264.937.000	1 Laporan	264.937.000	1 Laporan	264.937.000	1 Laporan	264.937.000	1 Laporan	1.220.477.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01 .1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	119.650.000	1 Dokumen	77.686.000	1 Dokumen	119.650.000	1 Dokumen	119.650.000	1 Dokumen	119.650.000	1 Dokumen	119.650.000	1 Dokumen	556.286.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
		0.00.01 .1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	606.530.000	100%	117.811.300	100%	2.257.030.000	100%	2.872.030.000	100%	3.597.030.000	100%	3.912.030.000	100%	12.755.931.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah																gangan	
		0.00.01 .1.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	500.00 0.000	1 Unit	1.000. 000.00 0	1 Unit	1.500. 000.00 0	1 Unit	2.000. 000.00 0	1 Unit	5.000.0 00.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	2 Unit	500.00 0.000	2 Unit	600.00 0.000	2 Unit	800.00 0.000	2 Unit	800.00 0.000	2 Unit	2.700.0 00.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	na	na	0	na	0	1 Paket	50.000 .000	2 Paket	50.000 .000	2 Paket	50.000 .000	2 Paket	50.000 .000	7 Paket	200.00 0.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	324.50 0.000	13 Unit	117.81 1.300	13 Unit	125.00 0.000	13 Unit	140.00 0.000	13 Unit	165.00 0.000	13 Unit	180.00 0.000	13 Unit	727.81 1.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01 .1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	621.80 2.000	3 Laporan	897.56 5.000	3 Laporan	1.000. 000.00 0	3 Laporan	1.200. 000.00 0	3 Laporan	1.500. 000.00 0	3 Laporan	1.800. 000.00 0	3 Laporan	6.397.5 65.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.023. 259.20 0	4 Laporan	1.212. 991.20 0	4 Laporan	1.330. 000.00 0	4 Laporan	1.440. 000.00 0	4 Laporan	1.550. 000.00 0	4 Laporan	1.660. 000.00 0	4 Laporan	7.192.9 91.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	658.91 5.342	100%	444.35 6.550	100%	362.50 0.000	100%	438.00 0.000	100%	513.00 0.000	100%	574.00 0.000	100%	2.331.8 56.550	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		0.00.01 .1.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	25.183 .000	1 Unit	29.333 .400	1 Unit	33.500 .000	1 Unit	38.000 .000	1 Unit	42.000 .000	1 Unit	47.000 .000	1 Unit	189.83 3.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya																	
		0.00.01 .1.09.0 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	56.619 .200	19 Unit	33.940 .000	19 Unit	45.000 .000	19 Unit	60.000 .000	19 Unit	75.000 .000	19 Unit	90.000 .000	19 Unit	303.94 0.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.09.0 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	na	na	0	na	0	2 Unit	50.000 .000	2 Unit	50.000 .000	2 Unit	50.000 .000	2 Unit	50.000 .000	8 Unit	200.00 0.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	38 Unit	38 Unit	244.95 8.550	26 Unit	308.23 8.750	28 Unit	120.00 0.000	30 Unit	135.00 0.000	32 Unit	150.00 0.000	34 Unit	160.00 0.000	34 Unit	873.23 8.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																	
		0.00.01 .1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	6.565.000	3 Unit	0	3 Unit	9.000.000	3 Unit	10.000.000	3 Unit	11.000.000	3 Unit	12.000.000	3 Unit	42.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	42.890.000	19 Unit	25.844.400	19 Unit	35.000.000	19 Unit	45.000.000	19 Unit	55.000.000	19 Unit	65.000.000	19 Unit	225.844.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		0.00.01 .1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	282.699.592	2 Unit	47.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	130.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	497.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
Terwujudnya daya saing sektor				Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,29 %	8,29 %		8,34 %		8,39 %		8,44 %		8,49 %		8,54 %		8,54 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Perdagangan																						
	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri			Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	5,22 %		n/a		5,32 %		5,38 %		5,43 %		5,49 %		5,49 %		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 573 Juta	US\$ 573 Juta		US\$ 630 Juta		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a				
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	485 perusahaan	485 perusahaan	46.483.000	515 perusahaan	29.788.700	545 perusahaan	35.000.000	575 perusahaan	40.000.000	605 perusahaan	45.000.000	635 perusahaan	50.000.000	635 perusahaan	199.788.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	90 %	90 %	46.483.000	92 %	29.788.700	94 %	35.000.000	96 %	40.000.000	98 %	45.000.000	99 %	50.000.000	99 %	199.788.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)																		
		3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	17.000	17.000	46.483.000	24.900	29.788.700	26.900	35.000.000	27.500	40.000.000	28.500	45.000.000	30.000	50.000.000	137.800	199.788.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	90 %	4.650.384.750	n/a	624.883.900	90 %	685.000.000	90 %	743.000.000	90 %	801.000.000	90 %	834.000.000	90 %	3.687.883.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Inflasi Pangan Bergejolak	2,22%	2,22%		2,21%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	25	4.650.384.750	25	624.883.900	25	685.000.000	25	743.000.000	25	801.000.000	25	834.000.000	25	3.687.883.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
		3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	44.577.000	1 Laporan	52.613.300	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	68.000.000	1 Laporan	76.000.000	1 Laporan	84.000.000	5 Laporan	340.613.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	4.605.807.750	1 Laporan	572.270.600	1 Laporan	625.000.000	1 Laporan	675.000.000	1 Laporan	725.000.000	1 Laporan	750.000.000	5 Laporan	3.347.270.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	16 %	16 %	2.666.005.800	17 %	130.212.000	20 %	960.000.000	20 %	990.000.000	20 %	1.040.000.000	20 %	1.070.000.000	20 %	4.190.212.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	256	256	2.666.005.800	230	130.212.000	371	960.000.000	427	990.000.000	470	1.040.000.000	517	1.070.000.000	2015	4.190.212.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi																		
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	na	na	0	na	0	105 Pelaku Usaha	700.00 0.000	119 Pelaku Usaha	700.00 0.000	127 Pelaku Usaha	700.00 0.000	139 Pelaku Usaha	700.00 0.000	490 Pelaku Usaha	2.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	na	na	2.350.991.800	na	0	6 Pelaku Usaha	110.00 0.000	8 Pelaku Usaha	120.00 0.000	8 Pelaku Usaha	150.00 0.000	8 Pelaku Usaha	160.00 0.000	30 Pelaku Usaha	540.00 0.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	315.014.000	230 Pelaku Usaha	130.212.000	260 Pelaku Usaha	150.00 0.000	300 Pelaku Usaha	170.00 0.000	335 Pelaku Usaha	190.00 0.000	370 Pelaku Usaha	210.00 0.000	1.495 Pelaku Usaha	850.212.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai	95 %	95 %	719.969.000	n/a	283.336.300	96 %	306.000.000	96,5 %	330.000.000	97 %	354.000.000	97,5 %	378.000.000	97,5 %	1.651.336.300	Dinas Perindustrian dan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			GAN KONSUMEN	dengan Standard																Perdagangan	
				Persentase penanganan sengketa konsumen	94%	94%		n/a		96%		97%		98%		99%		99%			
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,22%	2,22%		2,21%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45	45	412.746.000	35	261.334.300	30	280.000.000	25	300.000.000	20	320.000.000	15	340.000.000	125	1.501.334.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	45	45	412.746.000	35	261.334.300	30	280.000.000	25	300.000.000	20	320.000.000	15	340.000.000	125	1.501.334.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang	Jumlah jenis barang yang dipantau	25	25	307.223.000	25	22.002.000	25	26.000.000	25	30.000.000	25	34.000.000	25	38.000.000	25	150.002.000	Dinas Perindustrian dan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota																	Perdagangan	
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Beredar dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	307.223.000	1 Laporan	22.002.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	34.000.000	1 Laporan	38.000.000	1 Laporan	150.002.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp. 2,48 Milyar	Rp. 2,48 Milyar	1.606.452.250	Rp. 2,63 Milyar	1.775.000.000	Rp. 2,64 Milyar	1.250.000.000	Rp. 2,65 Milyar	1.250.000.000	Rp. 2,68 Milyar	1.250.000.000	Rp. 2,74 Milyar	1.250.000.000	Rp. 2,74 Milyar	6.775.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Pengguna	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	20 IKM	20 IKM	1.606.452.250	0	1.775.000.000	50	1.250.000.000	55	1.250.000.000	60	1.250.000.000	65	1.250.000.000	65	6.775.000.000	Dinas Perindustrian dan	

RENSTRA 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			n Produk Dalam Negeri																		Perdagangan	
		3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	760 UMKM	760 UMKM	1.606.452.250	1090 UMKM	1.775.000.000	300 UMKM	1.250.000.000	350 UMKM	1.250.000.000	400 UMKM	1.250.000.000	450 UMKM	1.250.000.000	2590 UMKM	6.775.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DIY	
Total						57.505.771.716		52.432.834.207		44.654.250.000		53.643.035.000		57.125.348.500		59.111.848.500		266.967.316.207				

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian dan perdagangan dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan bidang industri dan perdagangan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja ini merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
			Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	12,05 %	12,10 %	12,15 %	12,20 %	12,25 %	12,30 %	12,30 %
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	n/a	2,50 %	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
3	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 34 Juta/Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
5	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,29 %	8,34 %	8,39 %	8,44 %	8,49 %	8,54 %	8,54 %
6	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	n/a	5,32 %	5,38 %	5,43 %	5,49 %	5,49 %
7	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 - 2027 serta Kebijakan Kementerian Teknis. Disamping itu Renstra Disperindag DIY disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian secara makro dan berbagai tantangan dan permasalahan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Kontribusi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu mereka harus senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor industri dan perdagangan DIY sehingga pelaku usaha sektor industri dan perdagangan DIY menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pengembangan usaha sektor industri dan perdagangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

2023



**Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta**